

Akselerasi Pembangunan Manusia Melalui Pendekatan Pendidikan Berbasis Kawasan (Studi Kasus di Dinas Pendidikan Kota Mojokerto)

Romy Hermawan

Dosen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya
email: romy@ub.ac.id

Abstrack

The study examine the challenge of Indonesia education is how to build human resourse in a compete with other nations in the world. The acceleration of human development not only the government responsibility, but also must be involve all stakeholders becomes the starting point in answering the challenges. Furthermore, in the study used theoretical basis of thuman resource management in educational perspective, research methodology usede qualitative method. This study concludes that area-based education in which community involvement and the harmonious creation relationships could be accelerate of human development.

Keyword: Acceleration, Human Development, Area-based Education

Pendahuluan

Akselerasi pembangunan untuk kehidupan yang lebih baik dipengaruhi oleh berbagai faktor yang sangat kompleks sehingga keberhasilannya sering sekali menjadi hal yang sulit untuk diwujudkan. Tanpa mengesampingkan faktor-faktor lain, ada banyak hasil penelitian menunjukkan bahwa membangun kualitas atau mutu sumber daya manusia (SDM) merupakan dasar dari pembangunan, karena mutu SDM yang baik akan memberikan dampak yang cukup signifikan pada sektor-sektor lainnya untuk mencapai tujuan pembangunan secara komprehensif dan holistik.

Membangun SDM adalah dengan meningkatkan kualitas pendidikan. Membangun kualitas SDM dengan cara meningkatkan kualitas pendidikan adalah solusi tepat yang harus dilakukan (Sardjoko, 2013). Pendidikan merupakan investasi SDM yang mempunyai nilai strategis jangka panjang bagi kelangsungan hidup manusia. Berbicara mengenai kualitas pendidikan kita saat ini, di berbagai pemberitaan media massa dan hasil-hasil penelitian sering menyimpulkan bahwa kualitas pendidikan kita masih sangat rendah (Hidayat, 2011). Menurut *Education For All Global Monitoring Report* tahun 2012 yang dikeluarkan oleh UNESCO, pendidikan Indonesia berada di peringkat ke-64 untuk pendidikan dari 120 negara.

Peranan guru sangat menentukan dalam usaha peningkatan mutu pendidikan formal (Mistar, 2014). Determinasi guru dalam meningkatkan kualitas pendidikan dapat dipahami karena guru merupakan titik sentral, berhubungan langsung dengan siswa dalam pembaharuan dan peningkatan mutu pendidikan. Guru sebagai faktor utama penentu kualitas pendidikan secara langsung berhubungan pada tuntutan peningkatan mutu guru itu sendiri secara terus menerus. Mutu guru senantiasa berkembang mengikuti

perubahan-perubahan yang terjadi sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan tuntutan lapangan kerja.

Terselenggaranya pendidikan dengan baik dan upaya peningkatan kualitas guru sebagai ujung tombak dalam meningkatkan kualitas pendidikan tidak terlepas dari tanggung jawab pemerintah. Hal ini sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam pasal 11 sub (a) UU tersebut diuraikan bahwa Pemerintah dan Pemerintahan Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

Kota Mojokerto sebagai daerah otonomi tentunya memiliki langkah-langkah meningkatkan pembangunan manusia, SDM yang terbatas merupakan masalah utama yang dihadapi. Personil SDM yang terbatas diperhadapkan dengan jabatan-jabatan struktural baru dan tidak sedikit. Adanya jabatan-jabatan struktural yang tidak sedikit mengakibatkan kekurangan SDM adalah hal yang tidak terelakan. Solusi pragmatis adalah alih jabatan dari fungsional ke struktural, termasuk fungsional guru beralih ke struktural.

Mengantisipasi masalah rendahnya kualitas atau mutu guru adalah dengan terus menerus melakukan berbagai pelatihan bagi guru-guru. Program pelatihan ini diharapkan dapat menjawab kurangnya mutu SDM guru khususnya dalam meningkatkan kualitas pendidik di Kota Mojokerto. Menurut Alfian (2014) salah satu upaya untuk mengatasi kondisi sistem pengajaran guru saat ini maka diperlukan suatu tindakan proses (*action progress*) yang mampu meningkatkan motivasi dan kreatifitas guru dalam melakukan proses pembelajaran di kelas salah satunya dengan adanya program pelatihan atau *workshop* yang bersifat aplikatif.

Perumusan Masalah

1. Bagaimana pembangunan manusia itu dilaksanakan ?
2. Bagaimana konsep lembaga pendidikan berbasis kawasan ?
3. Bagaimanakah hubungan akselerasi pembangunan manusia dengan pendidikan berbasis kawasan itu ?

Kajian Teori

1. Pembangunan Manusia dan Realita Pendidikan

Pendidikan investasi dalam modal manusia adalah suatu komponen integral dari semua upaya pembangunan. Investasi dalam bidang pendidikan mempunyai pengaruh langsung terhadap produktivitas individu dan penghasilan. Kajian yang membandingkan produktivitas dan kemampuan berinovasi antara petani yang berpendidikan dan yang tidak berpendidikan di negara-negara berpendapatan rendah menunjukkan, ketika masukan-masukan seperti pupuk dan bibit unggul tersedia untuk teknik-teknik usaha tani yang lebih baik, hasil tahunan seorang petano yang berpendidikan selama empat tahun rata-rata 13% lebih tinggi dari pada seorang petani yang tidak berpendidikan (Baum dan Tolbert, 1988:177-178).

Investasi dalam bidang pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah dapat dilihat dari proporsi pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan terhadap total pengeluaran pembangunan. Menurut Susanti et al (1995:112)

secara tidak langsung proporsi pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan menunjukkan reaksi pemerintah atas semakin tingginya permintaan atas sarana dan prasarana pendidikan, dan seberapa jauh masyarakat menyadari pentingnya peranan pendidikan. Keadaan ini menjelaskan mengapa proporsi pengeluaran untuk sektor pendidikan di negara maju pada umumnya lebih tinggi dibandingkan dengan proporsi di negara yang sedang berkembang. Hal ini yang menjadi kendala utama untuk meningkatkan mutu pendidikan di negara sedang berkembang.

2. Realitas Kualitas Pendidikan di Indonesia

Kualitas pendidikan di Indonesia saat ini masih memprihatinkan. Ini dibuktikan antara lain dengan data United Nation Development Parogramma (UNDP) tentang peringkat Indeks Pengembangan Manusia (Human Development Index), yaitu komposisi dari peringkat pencapaian pendidikan, kesehatan, dan penghasilan per kepala yang menunjukkan, bahwa indeks pengembangan manusia Indonesia makin menurun. Di antara 182 negara di dunia, Indonesia menempati urutan ke-102 (1996), ke-99 (1997), ke-105 (1998), ke-109 (1999), dan ke -111 (2009).

Permasalahannya adalah kurangnya kesadaran untuk memberdayakan pendidikan di kota oleh masyarakat. Ciri kota dengan pola yang kurang dinamis terhadap perkembangan merupakan salah satu hal yang menyebabkan mengapa pendidikan di kota lambat berkembang. Padahal, lingkungan kota yang didiami masyarakat sebetulnya menyimpan potensi yang memberi dampak positif jika masyarakat kota itu sendiri mampu mengembangkan/mengolahnya. Keadaan ini bisa timbul jika masyarakat kota mempunyai tingkat kesadaran akan daya dan upaya yang dimilikinya.

3. Tingkat Partisipasi Pendidikan

Tingkat partisipasi pendidikan penduduk berkaitan dengan ketersediaan fasilitas seperti jumlah sekolah dan pemanfaatannya oleh masyarakat. Selain pengaruh keterbatasan jangkauan pada fasilitas tersebut, perlu diketahui pula aspek individu yang memanfaatkan fasilitas seperti kesadaran, motivasi, dan semangat untuk sekolah. Angka partisipasi pendidikan adalah persentase penduduk kelompok usia sekolah yang masih sekolah dibandingkan dengan total penduduk kelompok usia yang bersangkutan. Semakin tinggi angkanya, berarti semakin banyak penduduk usia sekolah SD/SLTP/SM yang bersekolah, sehingga semakin baik (Susanti, et al, 1995:115). Peningkatan angka partisipasi berarti peningkatan tingkat pengetahuan dan ketrampilan penduduk, yang diperlukan untuk meneruskan sekolah atau terjun ke dunia kerja. Boediono (1996:317-318) mengatakan bahwa dari sudut lain peningkatan pengetahuan tersebut merupakan juga sumber yang mampu untuk mengkonsumsi kandungan teknologi.

Dengan demikian, meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan penduduk, bukan hanya dapat memberikan lebih banyak peluang untuk masuk ke lapangan kerja namun juga meningkatkan jumlah pembelian produk-produk yang mempunyai kandungan teknologi. Meningkatnya jumlah penduduk yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan dapat merupakan

pasar bagi produk-produk berteknologi tersebut. Penduduk dengan tingkat pengetahuan dan keterampilan yang relatif tinggi akan dapat memahami dengan cepat penggunaan dan pemeliharaan produk-produk berteknologi tinggi seperti komputer, peralatan komunikasi dan lain sebagainya sehingga merangsang penduduk untuk mengkonsumsinya.

4. Ketersediaan Sarana Pendidikan

Peningkatan angka partisipasi menunjukkan adanya peningkatan permintaan terhadap pendidikan, yang juga dapat disediakan oleh sektor swasta. Investasi sektor swasta tersebut dapat diopandang sebagai dampak keterbatasan bangku sekolah yang dapat disediakan oleh pemerintah untuk mengakomodasikan seluruh peserta didik pada berbagai jenjang dan jenis pendidikan di seluruh wilayah. Persediaan (*supply*) jasa pendidikan dapat diukur berdasarkan jumlah bangku sekolah dan kelas yang ada (Suryadi, 1997:69).

5. Tingkat Pendidikan

Tambunan (1996:338) mengatakan bahwa jika dilihat dari sisi permintaan, salah satu penyebab utama tingkat pendidikan rata-rata masyarakat Indonesia masih rendah adalah kurang motivasi atau kemauan untuk mendapatkan pendidikan yang baik (tinggi). Ditambahkan oleh Todaro (1995:393), mengingat berbagai alasan ekonomi dan sosial maka lebih dari 15% anak-anak yang memasuki sekolah dasar akan putus sekolah setelah tahun pertama dan bertambah 10 % lagi pada tahun-tahun berikutnya. Sekitar 50% anak-anak yang telah duduk pada tahun pertama sekolah dasar tidak ingin menyelesaikan empat tahun berikutnya. Inilah yang menyebabkan tingkat partisipasi pendidikan yang tinggi belum berarti tingkat pendidikan juga akan tinggi.

Nilai IPM suatu negara atau wilayah menunjukkan seberapa jauh negara atau wilayah itu telah mencapai sasaran yang ditentukan yaitu angka harapan hidup 85 tahun, pendidikan dasar bagi semua lapisan masyarakat (tanpa kecuali), dan tingkat pengeluaran dan konsumsi yang telah mencapai standar hidup yang layak. Semakin dekat nilai IPM suatu wilayah terhadap angka 100, semakin dekat jalan yang harus ditempuh untuk mencapai sasaran itu.

2. Pendidikan di Indonesia

1. Realitas Kualitas Pendidikan di Indonesia

Perbedaan pendidikan kota dan kota memang secara umum berkisar pada masalah sarana dan prasarana sekolah. Sebagaimana diketahui, hal itu menjadi salah satu hal penting kenapa sekolah di kota lebih maju daripada di kota. Sarana dan prasarana yang menunjang untuk kegiatan belajar mengajar sangat membantu peserta didik daripada yang sarana dan prasarananya tidak menunjang.

Dalam rangka pemberdayaan ini, upaya yang amat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan, serta akses ke dalam sumber-sumber kemajuan kecakapan hidup seperti fasilitas pendidikan, informasi, balai latihan, serta fasilitas untuk kegiatan pengembangan pendidikan di kota. Hal ini dikarenakan program-program umum yang berlaku tidak selalu dapat menyentuh lapisan

masyarakat kota. Oleh sebab itu, diperlukan langkah-langkah simultan yang bisa membuka pencerahan pada masyarakat kota bahwa pendidikan adalah modal manusia untuk berkembang. Apalagi di zaman sekarang, akses informasi dan transportasi tidak menjadi penghalang utama.

2. Perencanaan Pendidikan

Menurut Breeby (1984) Adapun komponen-komponen yang ikut serta dalam proses ini adalah :

1. Tujuan pembangunan secara nasional yang terkait dengan pengambilan keputusan secara nasional pula
2. Masalah strategis secara operasional

Dalam penentuan kebijakan sampai kepada pelaksanaan perencanaan pendidikan ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu : siapa yang memegang kekuasaan, siapa yang menentukan keputusan, dan faktor-faktor apa saja yang perlu diperhatikan dalam pengambilan keputusan. Terutama dalam hal pemegang kekuasaan sebagai sumber lahirnya keputusan, perlu memperoleh perhatian, misalnya mengenai system kenegaraan yang merupakan bentuk dan system manajemennya, bagaimana dan siapa atau kepada siapa dibebankan tugas-tugas yang terkandung dalam kebijakan itu. Juga masalah bobot untuk jaminan dapat terlaksananya perencanaan pendidikan.

Hal ini dapat diketahui melalui output atau hasil system dari pelaksanaan perencanaan pendidikan itu sendiri, yaitu merupakan suatu dokumen dalam rencana pendidikan. Dari beberapa rumusan tentang perencanaan pendidikan tadi dapat dimaklumi bahwa masalah yang menonjol adalah suatu proses untuk menyiapkan suatu konsep keputusan yang akan dilaksanakan di masa depan. Dengan demikian, perencanaan pendidikan dalam pelaksanaan tidak dapat diukur dan dinilai secara cepat, tapi memerlukan waktu yang cukup lama, khususnya dalam kegiatan atau bidang pendidikan yang bersifat kualitatif, apalagi dari sudut kepentingan nasional.

Pendidikan Perencanaan pendidikan harus meliputi dua macam perencanaan, yaitu perencanaan makro yang membuat dimensi yang luas daripada sistem pendidikan dan relasinya dengan perencanaan dalam bidang sosial dan ekonomi serta perencanaan mikro yang memuat perencanaan mengenai proses internal daripada sistem pendidikan termasuk pola subsistem sub sistem yang ada di dalamnya.

3. Perencanaan Pendidikan Terpadu

Menuntut kualitas pengelolaan manajemen kelembagaan secara transparan, akuntabel, demokratik dan visioner. Dalam realitasnya masih banyak dijumpai pola pengelolaan manajemen di setiap satuan pendidikan yang tidak selaras dengan prinsip-prinsip Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah. Perencanaan pendidikan terpadu menuntut kualitas Peran Serta Masyarakat (PSM), dalam meningkatkan layanan pendidikan di setiap satuan pendidikan, khususnya dalam melaksanakan empat peran penting, yaitu sebagai:

1. Pemberi Pertimbangan;
2. Pendukung;

3. Pengontrol;
4. Mediator.

Dalam realitasnya keempat peran tersebut belum terlaksana dengan baik di setiap lembaga atau satuan pendidikan. Jadi, uraian tentang kelemahan pendekatan integratif atau terpadu atau sistemik sejatinya tidak menyangkut ranah konseptual, tetapi lebih bersentuhan pada tataran unsur pendukung dalam pelaksanaan program (aplikasinya). Oleh karena itu secara konseptual pendekatan perencanaan integrasi merupakan pendekatan yang paling baik apabila dibandingkan dengan pendekatan yang lain yang lebih bersifat parsial. Hal paling mendukung pelaksanaan program pendidikan pada perencanaan pendidikan integrative adalah :

1. Terus mendorong pengembangan kualitas SDM warga sekolah
2. Terus meningkatkan kualitas manajemen satuan pendidikan berdasarkan prinsip Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS).

Hudson menunjukkan 5 proses perencanaan yaitu *Radical, Advocacy, Transactive, Synoptic, dan Incremental* yang dikatakan sebagai *Taxonomy*. Perencanaan partisipatori berarti perencanaan yang melibatkan beberapa yang berkepentingan dalam merencanakan sesuatu yang dipertentangkan dengan merencanakan yang hanya dibuat oleh seseorang atau beberapa orang atas dasar wewenang kedudukan, seperti perencana di tingkat pusat kepala-kepala kantor pendidikan.

Konsep daripada perencanaan suatu program untuk pendidikan dalam menjalankan program pendidikan, prinsip yang harus disertakan adalah berkelanjutan, artinya proses pendidikan harus terus-menerus dijalankan dari generasi ke generasi berikutnya. Hal ini tidak terlepas dari konsep pendidikan seumur hidup. Untuk itu diperlukan suatu manajemen perencanaan yang terukur dan terarah di bidang pendidikan. Perencanaan sumber daya manusia memfokuskan perhatian pada langkah-langkah tertentu yang diambil oleh manajemen guna lebih menjamin bahwa dalam organisasi tersedia tenaga kerja yang tepat untuk menduduki berbagai kedudukan, jabatan dan pekerjaan yang tepat pada waktu yang tepat, dalam rangka pencapaian tujuan dan berbagai sasaran yang telah dan akan ditetapkan (Taqiyuddin : 2006). Menurut catatan Sukardika (2001), kualitas pendidikan Indonesia sampai saat ini berada pada posisi bawah bila dibandingkan dengan negara tetangga Malaysia, Philipina, Singapura, bahkan dengan Vetnam sekalipun.

3. Membangun Pendidikan Berbasis Masyarakat

1. Prinsip Menentukan Sendiri

Kesiapan masyarakat dalam belajar dapat diarahkan dengan pemahaman pentingnya pendidikan berbasis masyarakat (community based education). Dalam hal ini, diperlukan usaha dalam meningkatkan kesadaran masyarakat pekotaan akan pentingnya pendidikan dalam menyiapkan generasi yang berkualitas untuk kepentingan masa depan kota. Hal ini terkait dengan eksistensi serta keberlangsungan hidup dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan kehidupan yang berkelanjutan;

baik bagi masyarakat di pekotaan pada khususnya maupun bangsa pada umumnya.

Peranan bidang pendidikan berbasis masyarakat (community based education) merupakan salah satu upaya pembangunan dalam memberantas kebodohan dan diharapkan mampu memberantas kemiskinan yang terjadi serta dapat meningkatkan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi masyarakatnya. Dalam hal ini, terlebih masyarakat di pekotaan yang tingkat kesejahteraan hidupnya cukup rendah dibandingkan masyarakat di sekitar perkotaan yang mudah dan serba cepat dalam mengakses sumber daya yang tersedia. Dalam pencapaiannya, upaya lain yang dilakukan untuk mendukung tercapainya pemberantasan kemiskinan melalui partisipasi masyarakat untuk bergotong royong dan saling membantu dalam melakukan pemberdayaan secara terpadu, berkelanjutan dengan sarannya yang jelas.

Sinergitas pembangunan karakter (character building), hal ini mengandung arti pada satu sisi pendidikan membutuhkan peran masyarakat sebagai media dan sumber pembelajaran, dan pada sisi lain pendidikan juga harus mampu berperan membentuk karakter lulusan pendidikan formal maupun nonformal yang mampu menyumbangkan ilmu, wawasan, keahlian dan sikap diri kepada kota/masyarakat untuk mewujudkan dan memperkuat kemandirian kota yang dijiwai semangat gotong royong.

2. Prinsip Menolong Diri Sendiri

Prinsip ini mengandung pengertian bahwa anggota masyarakat dilayani dengan baik dalam pendidikan ketika kemampuan mereka untuk menolong diri mereka sendiri telah didorong dan dikembangkan. Mereka menjadi bagian dari solusi dan membangun kemandirian pendidikan dengan lebih baik, bukan tergantung karena mereka beranggapan bahwa tanggung jawab adalah untuk kesejahteraan mereka sendiri.

Untuk menunjang hal ini, pemerintah telah menyediakan fasilitas Lembaga Kursus dan Pelatihan, yaitu salah satu bentuk satuan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, serta mengembangkan profesi, bekerja, serta usaha mandiri (wirausaha). Program kursus dan pelatihan ini adalah jenis keterampilan yang diselenggarakan satuan pendidikan nonformal, dalam hal ini lembaga kursus dan pelatihan, dalam setiap lembaga kursus dan pelatihan dapat terdiri dari satu atau lebih program kursus dan pelatihan.

Penyadaran diri masyarakat merupakan satu di antara argumen-argumen yang diajukan oleh Paulo Freire (1984), dan ini adalah inti dari usaha bagaimana bisa mengangkat rakyat dari kelemahannya selama ini. Kesempitan pandangan dan cakrawala rakyat diubah ke arah suatu kesadaran, perasaan, pemikiran, dan gagasan bahwa hal-hal dapat menjadi lain dan tersedia alternatif-alternatif melalui pendidikan.

Bentuk aktualisasi dan pernyataan penyadaran diri masyarakat terhadap pendidikan secara kolektif dapat berupa partisipasinya dalam proses

pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kebutuhan dirinya dan kelompoknya dalam komunitas yang melingkupinya. Cara-cara kolektif berpartisipasi oleh masyarakat bisa teraktualisasikan dalam bentuk musyawarah dan juga terbentuknya institusi lokal oleh masyarakat itu sendiri.

4. Prinsip Lokalisasi atau Kawasan

Peran signifikan pendidikan dalam berkontribusi membangun sistem pendidikan berbasis lokalitas. Peran tersebut diwujudkan dengan terbentuknya sistem pendidikan nasional yang mengarah pada pemberdayaan potensi lokal Indonesia, misalnya pendidikan berbasis maritim, agraris, dan ciri khas lokal lainnya, sehingga memperkuat budaya dan potensi lokal yang dapat menopang perkembangan dan kemajuan pendidikan. Potensi terbesar tingkat partisipasi masyarakat tinggi terjadi ketika masyarakat diberi kesempatan dalam pelayanan, program dan kesempatan terlibat dekat dengan kehidupan tempat masyarakat hidup. Pendidikan yang lebih dimaknai dan bersifat membumi adalah ketika pendidikan itu dekat dengan kondisi dan lingkungan warga belajar.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa tanggung jawab pengembangan pendidikan sebagai proses sosialisasi adalah berada pada orang tua dan kelompok-kelompok masyarakat yang berkepentingan. Paradigma pengembangan lokalitas tersebut telah bergeser menuju kepada peluang yang lebar bagi teraktualisasikannya kembali partisipasi masyarakat, maka perlu segera dilakukan upaya pemulihan dan pengembalian tanggung jawab masyarakat terhadap pengembangan pendidikan baik yang berbasis kekayaan lokalnya masing-masing. Sebenarnya yang bertanggung jawab dalam hal ini adalah justru masyarakat itu sendiri. Mengacu pada lingkup partisipasi masyarakat, maka dalam pengembangan pendidikan, masyarakat harus dilibatkan sejak dari proses perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil dan evaluasinya.

5. Prinsip Keterpaduan Pemberian Pelayanan

Sebagaimana diamanatkan oleh UU Sisdiknas, 2003 bahwa pemerintah dan pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan, serta berkewajiban memberikan layanan dan kemudahan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Pemerintah dan pemerintah daerah juga wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara dari usia tujuh sampai usia lima belas tahun. Lebih dari itu, sebenarnya peluang bagi orang tua/warga dan kelompok masyarakat masih sangatlah luas.

Untuk itu, maka dalam kondisi kualitas layanan dan output pendidikan sedang banyak dipertanyakan mutu dan relevansinya, maka pemerintah seharusnya memberikan peluang yang luas bagi partisipasi masyarakat. Lebih dari itu, pemerintah perlu menyusun mekanisme sehingga orang tua dan kelompok-kelompok masyarakat dapat berpartisipasi secara optimal dalam pengembangan pendidikan di Indonesia

6. Mengurangi Tumpang Tindih Pelayanan

Untuk melaksanakan paradigma pendidikan berbasis masyarakat pada jalur nonformal berbasis pelayanan masyarakat, setidaknya-tidaknya memerlukan lima hal, yaitu :

- a. Teknologi yang digunakan hendaknya sesuai dengan kondisi dan situasi nyata yang ada di masyarakat.
- b. Ada lembaga atau wadah yang statusnya jelas dimiliki atau dipinjam, dikelola, dan dikembangkan oleh masyarakat.
- c. Program belajar yang akan dilakukan harus bernilai sosial atau harus bermakna bagi kehidupan peserta didik atau warga belajar dalam berperan di masyarakat.
- d. Program belajar harus menjadi milik masyarakat, bukan milik instansi pemerintah.
- e. Aparat pendidikan luar sekolah/nonformal tidak menangani sendiri programnya, namun bermitra dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan.

Pendidikan berbasis masyarakat (community-based education) merupakan mekanisme yang memberikan peluang bagi setiap orang untuk memperkaya ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pembelajaran seumur hidup.

7. Prinsip Menerima Perbedaan

Dalam prinsip ini terkandung pengertian menghindari pemisahan masyarakat berdasarkan usia, pendapatan, kelas sosial, jenis kelamin, ras, etnis, agama atau keadaan yang menghalangi pengembangan masyarakat secara menyeluruh. Ini berarti, pelibatan warga masyarakat perlu dilakukan seluas mungkin dan mereka didorong/dituntut untuk aktif dalam pengembangan, perencanaan dan pelaksanaan program pelayanan dan aktifitas-aktifitas kemasyarakatan.

8. Prinsip Tanggung Jawab Kelembagaan

Pendidikan sebagai proses pemanusiaan manusia membutuhkan sinergi antarkomponen dan membutuhkan kesepahaman visi seluruh stake holder yang terlibat. Komponen pendidikan yang meliputi raw material (input peserta didik), tools (alat-alat dan sarana prasarana), serta process (metode pembelajaran) adalah sebuah sistem yang akan menentukan kualitas output (lulusan), sedangkan stake holder yang terdiri atas siswa, guru, kepala sekolah, wali murid, dinas terkait dan pemerintah daerah harus sevisi dan sinergi sehingga memperlancar dan mempermudah pencapaian tujuan baik tujuan akademis maupun pembentukan moral.

Sebagaimana kita ketahui, lembaga pendidikan di Indonesia dalam UU diklasifikasikan dalam dua kelompok yaitu: sekolah dan luar sekolah, selanjutnya pembagian ini lebih rincinya menjadi tiga bentuk: informal, formal dan non-formal.

Birokrasi harus dapat menyesuaikan prinsip kelembagaan ini. Dengan demikian, pola memahami kondisi masyarakat mutlak diperlukan sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam penyediaan pendidikan di masyarakat.

Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan Interdisipliner. Penelitian ini selain berusaha memahami fenomena, menjelaskan fenomena dan memberikan temuan-temuan berdasarkan fenomena yang ada baik secara fakta dan data dalam objek penelitian, juga memahami dunia pendidikan secara menyeluruh dan secara sistemik. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian ini adalah kota Mojokerto, yang dalam hal ini dilakukan pengkajian akan penentuan penentuan model kawasan dalam lembaga pendidikan dan hubungannya pendidikan itu sendiri dengan pembangunan manusia.

2. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu data primer dan data sekunder.

3. Metode Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah:

- a) Teknik Observasi,
- b) Teknik Wawancara,
- c) Teknik Dokumentasi,
- d) Teknik Kepustakaan, .

4. Metode Analisis Data

Langkah-langkah dalam analisis data dan dokumen ini, peneliti menempuh langkah seperti berikut ini :

1. Mendokumentasikan hasil wawancara dan menarasikan konsep-konsep yang dikehendaki oleh kebanyakan pelaku pengelola pendidikan.
2. Menyimpulkan konsep-konsep dari beberapa literature terkait, guna mendapatkan konsep yang sesuai dengan perkembangan situasi dalam menentukan konsep pendidikan yang berbasis kawasan.
3. Menyatukan point pertama dengan kedua, dan dikaitkan dengan akselerasi pembangunan manusia dalam bentuk ulasan yang argumentative dan sistematis yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah akademis.
4. Langkah terakhir adalah memberikan rekomendasi bagi pihak terkait yang berkaitan dengan laporan ini, agar karya ini berdaya guna dengan baik.

Data dan Pembahasan

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indeks komposit yang dibuat lebih dari satu indeks yang digabung menjadi indeks tunggal. Indeks ini penting untuk melihat sampai seberapa jauh pertumbuhan dan pemerataan hasil pembangunan mampu secara nyata memberikan output berupa peningkatan kebutuhan fisik dasar manusia dan perluasan kemampuan manusia untuk melakukan pilihan-pilihan. Sebagai ukuran kemajuan pembangunan

manusia, IPM dapat digunakan untuk mengkaji kemajuan pembangunan manusia dalam dua aspek.

1. Untuk perbandingan antar wilayah yang memperlihatkan posisi suatu wilayah relatif terhadap wilayah yang lain berdasarkan besaran IPM yang disusun dalam suatu peringkat dari kemajuan pembangunan manusia di berbagai wilayah dalam kawasan yang sama.
2. Untuk mengkaji kemajuan dari pencapaian setelah berbagai program diimplementasikan dalam suatu periode.

IPM Kota Mojokerto Antar Waktu

Penyajian Indeks Pembangunan Manusia antar waktu, sangat bermakna karena akan diperoleh kemajuan maupun kemunduran dari status pembangunan itu sendiri. Pengukuran tingkat kemajuan dalam hal ini menggunakan *Shortfall Reduction* akan sangat tepat sebagai alat ukur yang diikuti oleh kriteria kualitasnya.

Tabel 1.7
Komponen IPM Kota Mojokerto Tahun 2011 - 2015

Komponen IPM	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015**
Indek Kesehatan	77,97	78,33	79,13	79,48	80,00
Indek Pendidikan	86,93	87,24	87,55	87,91	88,24
Indek PPP (Pengeluaran Perkapita)	67,59	68,45	69,31	69,95	70,75
IPM	77,50	78,01	78,66	79,12	79,66

Sumber : BPS Kota Mojokerto

****) Angka sangat sementara*

Berbagai upaya dan terobosan telah ditempuh Pemerintah Kota Mojokerto untuk meningkatkan kondisi perekonomian Kota Mojokerto. Langkah-langkah yang telah ditempuh dan hasil kemajuan yang dicapai sebagai hasil pembangunan khususnya pembangunan manusia dapat dilihat melalui besaran Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Tabel komponen IPM diatas adalah hasil perbaikan tahun dasar BPS Pusat sehingga angka masing-masing komponen IPM juga berubah, walupun tidak begitu signifikan.

IPM Kota Mojokerto pada tahun 2015 kembali mengalami peningkatan sebesar 0,54 poin dibanding periode sebelumnya yaitu dari 79,12 menjadi 79,66. Kenaikan IPM tahun 2015 disebabkan meningkatnya seluruh kompo-

nen IPM Kota Mojokerto. Kenaikan Indek Kesehatan Tahun 2015 Kota Mojokerto mencapai 0,52 poin, Indek Pendidikan naik 0,33 poin dan Indek PPP kenaikannya sebesar 0,80 poin.

Nilai IPM Kota Mojokerto Tahun 2015 sebesar 79,66. Angka tersebut apabila dimasukkan dalam kriteria UNDP termasuk dalam kategori menengah atas ($66 \leq \text{IPM} < 80$). Hal ini mengidentifikasi bahwa pembangunan yang selama ini dilaksanakan oleh pemerintah Kota Mojokerto dari tahun ke tahun tetap konsisten bahkan lebih baik, yaitu dari tahun ke tahun tetap mampu meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia di Kota Mojokerto. Karena nilai IPM Kota Mojokerto tersebut tergolong cukup tinggi. Hal ini bisa dibuktikan dengan besaran IPM Kota Mojokerto selama periode 5 tahun terakhir (Tahun 2011-2015) selalu masuk dalam kategori menengah atas ($66 \leq \text{IPM} < 80$).

Mewujudkan Kota Mandiri Pendidikan

Mandiri adalah kemampuan memberdayakan diri untuk mengatasi segala permasalahan dan kebutuhan yang dihadapinya dengan segenap potensi dan kemampuan yang ada padanya. Adapun, partisipasi dalam menciptakan kota mandiri pendidikan bisa terdiri dari partisipasi buah pikiran, harta benda, dan tenaga. Dalam makna yang lebih luas maka tujuan pengembangan kota mandiri pendidikan pada dasarnya adalah pengembangan demokratisasi, dinamisasi, dan modernisasi masyarakat kota dalam mengakses pendidikan.

Prinsip-prinsip kota mandiri pendidikan yang dikemukakan di sini ialah keterpaduan, berkelanjutan, keserasian, kemampuan sendiri (swadaya dan gotong royong), dan kaderisasi. Prinsip keterpaduan memberi tekanan bahwa kegiatan pengembangan kota mandiri pendidikan didasarkan pada program-program yang disusun oleh masyarakat dengan bimbingan dari lembaga-lembaga yang mempunyai hubungan tugas dalam pembangunan masyarakat.

Prinsip-prinsip tersebut memperjelas makna bahwa program-program pendidikan nonformal berbasis masyarakat harus dapat mendorong dan menumbuhkan semangat pengembangan masyarakat, termasuk keterampilan apa yang harus dijadikan substansi pembelajaran dalam pendidikan nonformal. Oleh karena itu, upaya untuk menjadikan pendidikan nonformal sebagai bagian dari kegiatan masyarakat memerlukan upaya-upaya yang serius agar hasil dari pendidikan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas hidup mereka

Kota Mojokerto yang mandiri, hanya bisa diwujudkan oleh kualitas sumber daya manusia yang baik. Kualitas Sumber daya manusia yang baik ini akan bisa diwujudkan, manakala ada penataan lembaga pendidikan baik formal maupun non formal yang apik dan sesuai dengan keinginan masyarakat. Hal yang demikian ini bisa terwujud, jika masyarakat melalui tokoh-tokoh masyarakat diajak diskusi dan serap pendapat terkait program yang dimaksud. Ini artinya lembaga pendidikan, peserta didik, masyarakat dan Pemerintah harus melakukan kajian dengan duduk bersama untuk membahas

model dan pelaksanaan pendidikan yang dinamakan pendidikan berbasis kawasan.

Sarana dan Prasarana Pendidikan

Dalam rangka mengatur substansi fasilitas atau sarana di sekolah di gunakan suatu pendekatan administratif tertentu yang disebut juga manajemen sarana pendidikan. Manajemen sendiri merupakan proses pendayagunaan semua sumber daya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pendayagunaan melalui tahapan proses yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Sarana pendidikan adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar mengajar baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak agar pencapaian tujuan pendidikan dapat berjalan dengan lancar, teratur, efektif, dan efisien.

Sebagaimana hasil pengamatan Dinas Pendidikan Kota Mojokerto, bahwa Pulorejo merupakan daerah yang sangat siap untuk dijadikan pendidikan berbasis kawasan. Hal ini didukung oleh keberadaan Pulorejo yang mempunyai moto "*Kampung Bahasa dan Sehat*", disini ada beberapa lembaga informal kursus bahasa inggris yang representative, dan masyarakatnya kerkelakuan sehat dalam berkehidupan . Di kelurahan Pulorejo memiliki rencana pendidikan tingkat tinggi di tahun 2017, ini artinya sudah memiliki pengkondisian-pengkondisian lokasi terkait hal tersebut. Kesimpulannya Kelurahan Pulorejo lebih siap untuk dijadikan pendidikan berbasis kawasan sebagai embrionya.

Kelurahan Pulorejo menjadi daerah sangat representative karena jika pembangunannya menjadi luas dan membutuhkan lahan, daerah ini dekat dengan Kelurahan Booto. Karena Blooto relatif masih jarang pembangunan. Hal ini juga sudah didukung prasarana pembangunan jembatan melintas sungai yaitu dari Pulorejo ke Blooto, sehingga dapat dijadikan poin penting dalam proses pembangunan pendidikan berbasis kawasan. Sisi lain dalam pertimbangan ini adalah lebih meratanya pembangunan Kota Mojokerto di bagian barat, sebagaimana keinginan bapak Walikota Kota Mojokerto.

Sumbangsih Pendidikan Terhadap Akselerasi Pembangunan

Pendidikan untuk menggali kemampuan dalam segala hal dan menyesuaikan diri dengan lokasi merupakan bekal mutlak di dalam anak cucu Adam. Kemampuan jasmaniah dan rohaniah manusia dibentuk oleh pendidikan dengan pemberian pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai serta sikap-sikap dalam kehidupan bermasyarakat. Proses transformasi tersebut berlangsung secara formal, non-formal, dan informal. Dalam hubungan ini, perlu diketahui bahwa wawasan kehidupan yang merupakan sumber motivasi bagi cara-cara hidup, penemuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kecakapan teknis umat manusia dewasa ini merupakan buah dari usaha pendidikan baik formal, informal, maupun nonformal.

Dengan demikian pendidikan dalam maknanya yang luas senantiasa menstimulir dan menyertai perubahan dan perkembangan manusia. Sedangkan usaha pembangunan itu sendiri selamanya merupakan ikhtiar untuk menjawab tantangan masalah dan hajat hidup suatu masyarakat atau bangsa. Pembangunan yang dimaksud dapat menjelma

sebanyak dan seluas segi kehidupan manusia seperti bidang : ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan keamanan, dan sebagainya. Untuk Indonesia pembangunan meliputi keempat bidang diatas.

Pembangunan lembaga pendidikan berbasis kawasan menjadi lembaga pendidikan yang memiliki akselerasi, karena beberapa alasan :

1. Model ini meningkatkan semangat belajar karena dukungan atmosfer
2. Kehadiran lembaga bimbingan belajar menjadikan pelajar lebih meningkatkan kualitasnya
3. Lembaga kursus menjadikan pelajar bernilai lebih

Kota Mojokerto yang merupakan daerah dekat dengan kota Metropolitan Surabaya, tentunya akan terimbas oleh model budaya dan pola pikir kota Metropolitan. Sehingga menjadi suatu keharusan untuk menata lembaga pendidikan, terlebih pendidikan berbasis kawasan.

Masyarakat dan Pendidikan Berbasis Kawasan

Dilihat dari konsep pendidikan, masyarakat adalah sekumpulan orang dengan berbagai ragam kualitas diri yang tidak berpendidikan sampai dengan yang berpendidikan. Sementara itu, dilihat dari lingkungan pendidikan, masyarakat disebut lingkungan nonformal yang memberikan pendidikan secara sengaja dan berencana kepada seluruh anggotanya, tetapi tidak sistematis.

Hubungan antara sekolah dan masyarakat pada hakekatnya adalah suatu sarana yang cukup mempunyai peranan yang menentukan dalam rangka usaha mengadakan pembinaan pertumbuhan dan pengembangan murid-murid di sekolah. Secara umum orang dapat mengatakan apabila terjadi kontak, pertemuan dan lain-lain antara sekolah dengan orang di luar sekolah, adalah kegiatan hubungan sekolah dengan masyarakat.

Di dalam masyarakat ada sumberdaya manusia dan sumber daya non manusia. Dari kedua sumber daya itu, sekolah dapat memilih dan memanfaatkan untuk program pendidikan sekolah. Jika sekolah itu berhasil memanfaatkan secara maksimal, maka hasil belajar anak akan lebih baik. Dengan demikian potensi anak akan bertumbuh dan berkembang secara maksimal. Pengaruh yang lebih jauh dari perkembangan anak tersebut adalah tujuan pendidikan sekolah akan tercapai dengan meyakinkan.

Hubungan Lembaga Pendidikan Dengan Masyarakat Lingkungan

Hubungan sekolah dengan masyarakat ingin berhasil mencapai sasaran, baik dalam arti sasaran masyarakat atau orang tua yang dapat diajak kerjasama maupun sasaran hasil yang diinginkan, maka beberapa prinsip-prinsip pelaksanaan di bawah ini harus menjadi pertimbangan dan perhatian. Biasanya sering terjadi sekolah tidak menginformasikan atau menutupi sesuatu yang sebenarnya menjadi masalah sekolah dan perlu bantuan atau dukungan orang tua murid. Oleh sebab itu sekolah harus sedini mungkin mengantisipasi kemungkinan adanya salah persepsi, salah interpretasi tentang informasi yang disajikan dengan melengkapi informasi yang akurat dan data yang

lengkap, sehingga dapat diterima secara rasional oleh masyarakat. Hal ini sangat penting untuk meningkatkan penilaian dan kepercayaan masyarakat atau orang tua murid terhadap sekolah, atau dengan kata lain transparansi sekolah sangat diperlukan, lebih-lebih dalam era reformasi dan abad informasi ini, masyarakat akan semakin kritis dan berani memberikan penilaian secara langsung tentang sekolah.

Kenyataan membuktikan, hubungan sekolah dengan masyarakat tidak selalu berjalan baik. Berbagai kendala yang sering ditemukan antara lain: komunikasi yang terhambat dan tidak profesional, tindak lanjut program yang tidak lancar dan pengawasan yang tidak terstruktur. Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut beberapa hal bisa menjadi alternatif, adanya laporan berkala mengenai berbagai kegiatan sekolah serta keuangannya, diadakannya berbagai kegiatan yang mengakrabkan seperti open house kunjungan timbal balik dan program kegiatan bersama seperti pentas seni, perpisahan.

Masyarakat yang sudah mendukung, maka secara tidak sadar masyarakat akan menjadi media proposi secara personal selling dalam dunia pendidikan. Personal selling tentunya akan menguntungkan kesuksesan perjalanan pendidikan ini ke depan. Paling tidak masyarakat yang bersangkutan akan menyuruh anak dan saudaranya untuk masuk ke lembaga pendidikan yang dikembangkan, hal ini dilakukan karena masyarakat telah mengetahui dan mendukung program pendidikan berbasis kawasan yang dimaksud. Kesimpulannya keberhasilan model ini adalah didahului keberhasilan atas dukungan penuh dari masyarakat Kota Mojokerto.

Kesimpulan dan Rekomendasi

1. Kesimpulan

Pendidikan berbasis masyarakat adalah bahwa masyarakat yang menentukan kebijakan serta ikut berpartisipasi didalam mananggung beban pendidikan, bersama seluruh masyarakat setempat, tentang pendidikan yang bermutu bagi anak-anak mereka dalam pengertian ini masyarakat tidak semestinya menyerahkan seluruh pendidikan anak-anak mereka kepada sekolah semata-mata, tetapi ikut memikirkan serta bertanggung jawab bersama kalangan pendidikan akan berhasilnya pendidikan anak-anak mereka.

Dari data yang dikumpulkan oleh tim peneliti, disimpulkan bahwa wilayah yang relevan untuk dijadikan kawasan pendidikan adalah kelurahan Pulorejo dan Blooto, hal ini ditunjang infrastruktur jalan yang cukup memadai atau pembangunan jembatan dari Pulorejo ke Blooto yang melintas diatas sungai. Di sisi lain di Pulorejo sudah ada embrio lembaga pendidikan yang terpusat, dan di dukung oleh program keluarahn Pulorejo yang dijadikan sebagai wilayah dengan semboyan “ **Kampung Bahasa Yang Sehat** ” .

2. Rekomendasi

Setelah memperhatikan pembahasan hingga kesimpulan terkait dengan permasalahan yang ada, maka yang bisa kami rekomendasikan adalah :

1. Pihak Pemerintah dalam hal ini Walikota Kota Mojokerto, hendaknya menerbitkan SK penetapan kawasan pendidikan atau pendidikan berbasis kawasan untuk wilayah yang sudah disepakati.
2. Kegiatan SKPD-SKPD yang terkait dengan pendidikan, harus lebih diarahkan ke wilayah kawasan pendidikan.
3. Pemerintah kota hendaknya membuat master plan terkait dengan wilayah pendidikan berbasis kawasan.
4. Pemerintah melakukan pengkondisian masyarakat disekitar kawasan yang dimaksud dengan sosialisasi program, dengan menggunakan aparat kelurahan dan lembaga lain ditingkat kelurahan, sehingga rencana pembangunan pendidikan berbasis kawasan bisa lancar tanpa halangan dari masyarakat.

Daftar Pustaka

- Ardhana, I Wayan. (Penyunting). 1986. *Pengantar Dasar-Dasar Kependidikan*. Malang: Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP MALANG.
- Atmosudirdjo, Prajudi. 1982. *Administrasi dan Manajemen Umum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Battle, J.A. & Shannon, L. Robert. 1986. *The New Idea in Education*. New York, Evanstor and London Harper & Row, Publisher,
- Breeby, C.F. 1984. *Perencanaan dan Administrator Pendidikan (Diterjemahkan oleh Istiwidayanti)*. Jakarta: Penerbit Bhatara Karya Aksara.
- Coombs. Philip, H. 19 70. *What is Educational Planning*. Paris: Unesco.
- Kartidirdjo, Sartono. 1993. *Pembangunan Bangsa*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat. 1990. *Peraturan Pelaksanan Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Armas Duta Jaya
- Majelis Perniusyawaratan Rakyat. 1993. *Ketetapan-Ketetapan MPR Republik Indonesia*. Surabaya: Bina Pustaka Tama.
- Massie, Joseph. L. 1979. *Essentials of Management* New York. Pretice Hall. Inc. Englewood Cliffs.
- Semiawan, Conny & Soedijarto (edit). 1991. *Mencari Strategi Pengembangan Pendidikan Nasional Menjelang Abad XXI*. Jakarta: Gramedia Widjasarana.
- Tim Down FIP IKIP MALANG. 1980. *Pengantar DasarDasar Kependidikan*. Surabaya Usaha Nasional.
- Vaizey, John. 1967. *Education in The Modern World* NeW York. Mc. Graw Hill, Book Company.
- Veeger, K.J. 1985. *Realitas Sosial* Jakarta: Gramedia.
- Ahmadi, Abu, *Psikologi Umum*, Cet. 3; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003
- Arcaro, Jerome S, *Pendidikan Berbasis Mutu*, Pustaka Pelajar, Yokyakarta, 2007
- Douglas. *Teori Sosiologi Modern*. Edisi 6. Jakarta: Kencana, 2008
- Heri, Agus Brutosusilo. *Masyarakat dan Kebebasan*. Jakarta : Rajawali. 1986
- Nehnevajsa, Jiri. *Sosiologi Modernisasi*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1993
- Shadily, Hassan, *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*, Cet. 10; Jakarta: PT Bina Aksara, 1984

- Slameto, *Belajar dan Factor-Faktor Yang Mempengaruhinya*, Rineka cipta, Jakarta, cetakan empat, Oktober 2003
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Cet. 30; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000
- Subaidin, *Pendidikan Berbasis Masyarakat*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007
- Sunarto, Kamanto. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1993
- Syah, Muhibbin. *Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan Baru*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004
- Vysen. A. *Individu dan Masyarakat*. Bandung: Sumur Bandung. 1967.
- Wahyu, Ramdani, *Ilmu Sosial Dasar*, Cet. 1; Bandung: CV Pustaka Setia, 2007
- Widagdho, Djoko, *Ilmu Budaya Dasar*, Cet. 7; Jakarta: PT Bumi Aksara, 2001
- Winarno dan Herimanto, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, Cet. 4; Jakarta: Bumi Aksara, 2010
- Yusuf, Syamsu, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, Cet. 6; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005